

Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Peran Pengetahuan Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Internal

Mulyati Widyaningsih^{1*} Syagiratul Afiah²

¹ Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia.

² Bisnis Digital, Politeknik AMA Bima, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: Meskipun Pemkab Dompu meraih opini WTP berturut-turut (2014-2022), BPK masih menemukan kelemahan administratif terkait SDM dan pengawasan, diperkuat oleh masih adanya inkonsistensi temuan pada literatur terdahulu.

Tujuan: Menguji pengaruh pengetahuan akuntansi, penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Dompu.

Metode: Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik *total sampling* pada 96 pegawai BPKAD yang kemudian dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling - Partial Least Squares* (SEM-PLS).

Hasil: Secara simultan, ketiga variabel memengaruhi 63,5% kualitas laporan. Secara parsial, pengetahuan akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan, dengan pengendalian internal sebagai faktor paling dominan. Sebaliknya, penerapan SIA tidak memberikan pengaruh secara empiris.

Kesimpulan: Keandalan laporan keuangan sangat ditentukan oleh kompetensi akuntansi dan pengawasan internal yang kuat. Tidak signifikannya SIA membuktikan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan optimal tanpa sinkronisasi kapasitas penggunaannya dan keselarasan kebijakan manajerial.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan; Pengetahuan Akuntansi; Sistem Informasi Akuntansi; Pengendalian Internal

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan instrumen penting bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) (Tyran, 2001), setiap entitas pemerintahan memiliki kewajiban normatif dan legitimasi untuk menyusun pelaporan yang mematuhi standar perundang-undangan (Rumangun et al., 2021). Kualitas laporan ini diukur dan dievaluasi secara independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemberian opini, di mana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi indikator utama bahwa laporan telah disajikan secara andal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Secara teoretis, laporan yang berkualitas harus memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dimengerti (Pramitha et al., 2024; Febriana et al., 2025; Ulfa et al., 2026; Masita & Mansyuri, 2026).

Namun, secara praktis, pencapaian opini WTP tidak selalu merepresentasikan ketiadaan masalah dalam tata kelola keuangan. Fenomena ini terjadi pada Pemerintah Kabupaten Dompu. Meskipun berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK sejak tahun 2014 hingga 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK masih mencatat berbagai temuan signifikan. Temuan tersebut meliputi kelemahan pada sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Pemda (Setda Kabupaten Dompu, 2022). Lebih lanjut, permasalahan internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu menunjukkan masih adanya kendala dalam penyajian data yang akurat akibat kurangnya kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah praktis di mana opini audit yang optimal belum berbanding lurus dengan kualitas proses penyusunan laporan keuangan itu sendiri.

Dalam mengurai determinan kualitas laporan keuangan, literatur terdahulu telah banyak menyoroti peran kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Pengetahuan akuntansi yang memadai memungkinkan aparat pemerintah untuk mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum transaksi secara sistematis dan sesuai standar (Wijayanti & Ariyani, 2022). Pemahaman ini menjadi mendasar karena laporan keuangan yang berkualitas sangat bergantung pada kapabilitas penyusunnya (Wardani & Norsain, 2020). Selain kompetensi individu, integrasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga terbukti vital. SIA yang andal memfasilitasi organisasi dalam memproses data transaksi menjadi informasi finansial yang akurat untuk pengambilan keputusan, mencakup keseluruhan sistem dari infrastruktur perangkat lunak hingga prosedur pengamanan (Sijabat & Lestary, 2022; Putri & Endiana, 2020; Setiawati & Hariyono, 2025; Wahtan et al., 2025). Sejumlah studi mengonfirmasi bahwa pengetahuan akuntansi dan penerapan SIA memberikan dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Wardani & Norsain, 2020; Amalia, 2023; Hanafi et al., 2024; Lestari & Dewi, 2023).

Selain aspek SDM dan teknologi, sistem pengendalian internal memegang peranan krusial sebagai pilar pengaman. Pengendalian internal dirancang untuk melindungi aset, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan entitas, serta menjamin keakuratan catatan akuntansi (Nur et al., 2023). Efektivitas pengendalian ini berfungsi sebagai sumber informasi independen yang mencegah terjadinya *fraud* maupun *human error* dalam penyusunan laporan (Setiawati & Hariyono, 2025). Penelitian dari Rohmah et al. (2020) serta Andriani et al. (2025) memperkuat pandangan bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan berkualitas.

Meskipun kerangka teoretis dan sebagian besar bukti empiris menunjukkan pengaruh positif dari ketiga variabel di atas, literatur terkini masih menyisakan inkonsistensi temuan yang signifikan (*empirical gap*). Terkait pengetahuan akuntansi, temuan Malindar et al. (2023) dan Nur et al. (2023) justru membuktikan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan. Pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi, anomali serupa juga ditemukan oleh Maulida & Tumirin (2025), Niswah & Andriyanto (2025) serta Rizki et al. (2024) yang menegaskan bahwa kecanggihan sistem informasi tidak memberikan dampak bermakna terhadap output pelaporan. Kesenjangan hasil juga terjadi pada pengujian efektivitas pengendalian internal, di mana studi Margaretha & Sari (2021) membantah perannya sebagai determinan kualitas pelaporan. Inkonsistensi temuan dari berbagai peneliti terdahulu ini menuntut adanya pengujian kembali (*re-test*), terutama dengan menempatkannya pada konteks pemerintahan daerah yang memiliki kompleksitas masalah tersendiri (seperti halnya temuan berulang BPK di lingkungan Pemkab Dompus meski berstatus WTP).

Berangkat dari fenomena praktis dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dan membuktikan secara empiris pertanyaan penelitian berikut: (1) Apakah pengetahuan akuntansi berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah?; (2) Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan tersebut?; (3) Apakah efektivitas pengendalian internal mampu mendorong kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompus? dan Apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompus?. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus observasi yang tidak hanya menguji locus pemerintahan secara umum, melainkan menginvestigasi anomali pada entitas yang secara predikat telah meraih opini WTP selama delapan tahun berturut-turut namun masih menyimpan catatan kelemahan mendasar dari BPK. Penelitian ini memberikan perspektif kritis bahwa predikat WTP bukan merupakan garis akhir dari kualitas laporan keuangan, melainkan menuntut pembenahan integratif antara kapasitas SDM, keandalan sistem, dan pengawasan internal yang berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini melibatkan partisipan yang merupakan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompus. Mengingat jumlah populasi yang relatif terjangkau, yaitu sebanyak 96 pegawai, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *total sampling* atau sensus (Sugiyono, 2019), di mana seluruh anggota populasi ditetapkan sebagai responden (n=96). Partisipan mencakup pegawai dari seluruh struktur organisasi di BPKAD, yang terdiri atas Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Bidang Aset. Pelibatan seluruh bidang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) di instansi tersebut secara holistik saling berkesinambungan dan berkontribusi terhadap efektivitas proses administratif, pencatatan, verifikasi, hingga bermuara pada pelaporan keuangan daerah.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan, yang dipengaruhi oleh tiga variabel bebas, yaitu Pengetahuan Akuntansi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Pengendalian Internal. Instrumen pengukuran untuk seluruh variabel diadaptasi dari literatur terdahulu, di mana rincian indikator beserta sumber referensi dari masing-masing variabel disajikan secara lengkap pada Tabel 1. Kategori respons partisipan diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan rentang skor 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Berdasarkan uji empirik yang dilakukan oleh penulis, seluruh alat ukur ini telah dinyatakan reliabel, dibuktikan dengan nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* yang berada di atas ambang batas 0,70.

Tabel 1. Variabel dan pengukuran

Variabel	Kode	Indikator	Sumber
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	KLK.1	Relavan	Taufiqurrohman (2021).
	KLK.2	Keandalan	
	KLK.3	Dapat dibandingkan	
	KLK.4	Dapat dipahami	

Pengendalian Internal (X3)	P1.1	Lingkungan pengendalian	(Lestari & Dewi, 2023)
	P1.2	Penilaian resiko	
	P1.3	Aktivitas pengendalian	
	P1.4	Informasi dan komunikasi	
	P1.5	Aktivitas pemantauan	
Pengetahuan Akuntansi (X1)	PA.1	Pemahaman prinsip-prinsip akuntansi	Wijayanti & Aryani (2022)
	PA.2	Pengetahuan tentang standar akuntansi	
	PA.3	Pemahaman kebijakan akuntansi	
	PA.4	Kemampuan menganalisis laporan	
	PA.5	Penggunaan metode pengukuran	
	PA.6	Pemahaman terhadap resiko akuntansi	
	PA.7	Keterampilan identifikasi kesalahan	
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	SIA.1	Kualitas Sistem	(Putri & Endiana, 2020)
	SIA.2	Kualitas Informasi	
	SIA.3	Kualitas Layanan	
	SIA.4	Pengguna Sistem	

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2026

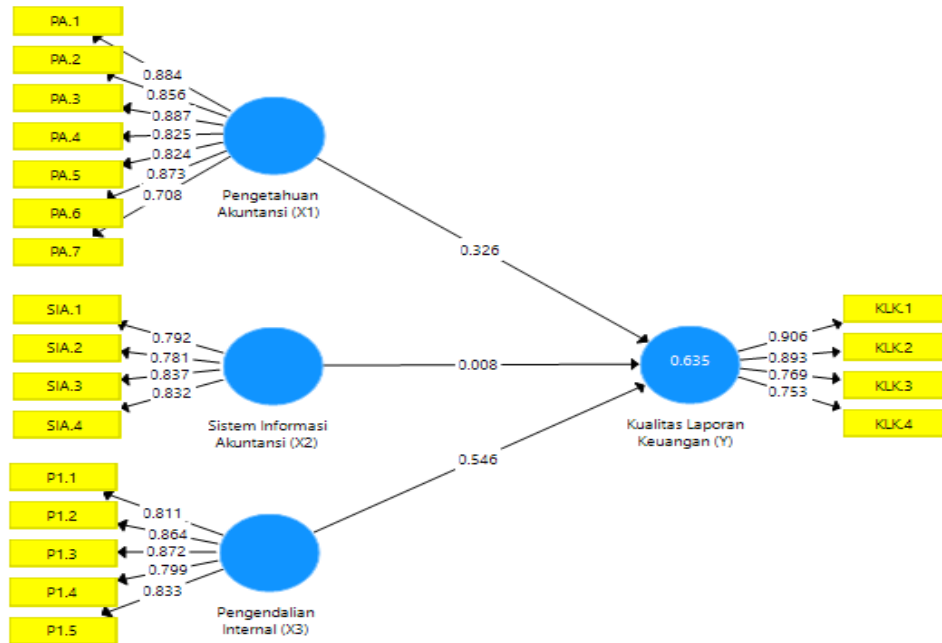
Data primer yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *Structural Equation Modeling - Partial Least Squares* (SEM-PLS). Pemilihan teknik PLS ini sangat tepat karena keunggulannya dalam menangani ukuran sampel yang tergolong tidak terlalu besar ($n=96$) dan kemampuannya menguji model prediktif tanpa menuntut asumsi distribusi normalitas data yang ketat (Ghozali, 2018; Hair, 2014). Evaluasi model dilakukan melalui dua tahapan, yakni penilaian *outer model* (model pengukuran) dan *inner model* (model struktural) (Henseler et al., 2015). Pada *outer model*, selain mengevaluasi *loading factor*, validitas diskriminan diuji secara ketat menggunakan kriteria Fornell & Larcker (1981), di mana akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) suatu konstruk harus lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Pengujian *inner model* untuk menguji hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* untuk mendapatkan nilai *t-statistics* dan *p-values*, sekaligus menilai kekuatan prediksi model (nilai R^2 dan ukuran efek f^2) dengan mengacu pada ambang batas yang disarankan oleh Cohen (1988). Seluruh rangkaian dan prosedur pengumpulan maupun analisis data pada riset ini telah memenuhi kode etik penelitian, di mana partisipasi responden bersifat sukarela (*informed consent*) dan kerahasiaan identitas serta data individu dijamin sepenuhnya oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, sebuah instansi yang menjadi fokus observasi karena memiliki anomali berupa keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak tahun 2014 hingga 2022, namun masih memiliki catatan temuan terkait kelemahan pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia. Responden dalam penelitian ini melibatkan seluruh pegawai instansi tersebut yang berjumlah 96 orang, yang ditarik menggunakan teknik *total sampling* atau sensus. Partisipasi responden mencakup seluruh struktur organisasi, mulai dari Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, hingga Bidang Aset. Pelibatan seluruh elemen ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang saling berkesinambungan secara holistik dan berkontribusi langsung terhadap efektivitas proses administratif yang bermuara pada kualitas pelaporan keuangan daerah

Gambar 1. Analisis Jalur



Sumber: Output SmartPLS, 2026

Tabel 2. Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Variabel	Indikator	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (CR)	AVE
Kualitas Laporan Keuangan (KLK)	KLK.1	0,906	0,850	0,900	0,694
	KLK.2	0,893			
	KLK.3	0,769			
	KLK.4	0,753			
Pengendalian Internal (PI)	P1.1	0,811	0,892	0,921	0,699
	P1.2	0,864			
	P1.3	0,872			
	P1.4	0,799			
	P1.5	0,833			
Pengetahuan Akuntansi (PA)	PA.1	0,884	0,929	0,943	0,703
	PA.2	0,856			
	PA.3	0,887			
	PA.4	0,825			
	PA.5	0,824			
	PA.6	0,873			
	PA.7	0,708			
Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	SIA.1	0,792	0,826	0,885	0,657
	SIA.2	0,781			
	SIA.3	0,837			
	SIA.4	0,832			

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian telah memenuhi kaidah standar evaluasi (Hair, 2014; Ghozali, 2018). Validitas konvergen tercapai dengan baik melalui indikator nilai *outer loading* > 0,70 dan *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,50, sementara tingkat keandalannya terkonfirmasi kuat oleh nilai *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability* (CR) yang konsisten berada di atas ambang batas minimum 0,70. Dengan terpenuhinya seluruh syarat mutlak validitas dan reliabilitas tersebut, alat ukur yang digunakan dinyatakan sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis pada model struktural (*inner model*).

Tabel 3. Validitas Diskriminan (*Fornell-Larcker Criterion*)

Variabel	KLK	PI	PA	SIA
KLK	0,833			
PI	0,754	0,836		
PA	0,671	0,620	0,839	
SIA	0,668	0,748	0,774	0,811

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria kelayakan *Fornell-Larcker*. Hal ini dibuktikan dengan nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) pada garis diagonal utama untuk masing-masing variabel yakni Kualitas Laporan Keuangan (0,833), Pengendalian Internal (0,836), Pengetahuan Akuntansi (0,839), dan Sistem Informasi Akuntansi (0,811) yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Pemenuhan kriteria dari Fornell & Larcker (1981) ini menegaskan bahwa setiap instrumen variabel dalam penelitian ini bersifat unik secara empiris dan mampu mengukur fenomena yang berbeda secara spesifik, sehingga model pengukuran terhindar dari masalah tumpang tindih (*overlapping*) antar variabel.

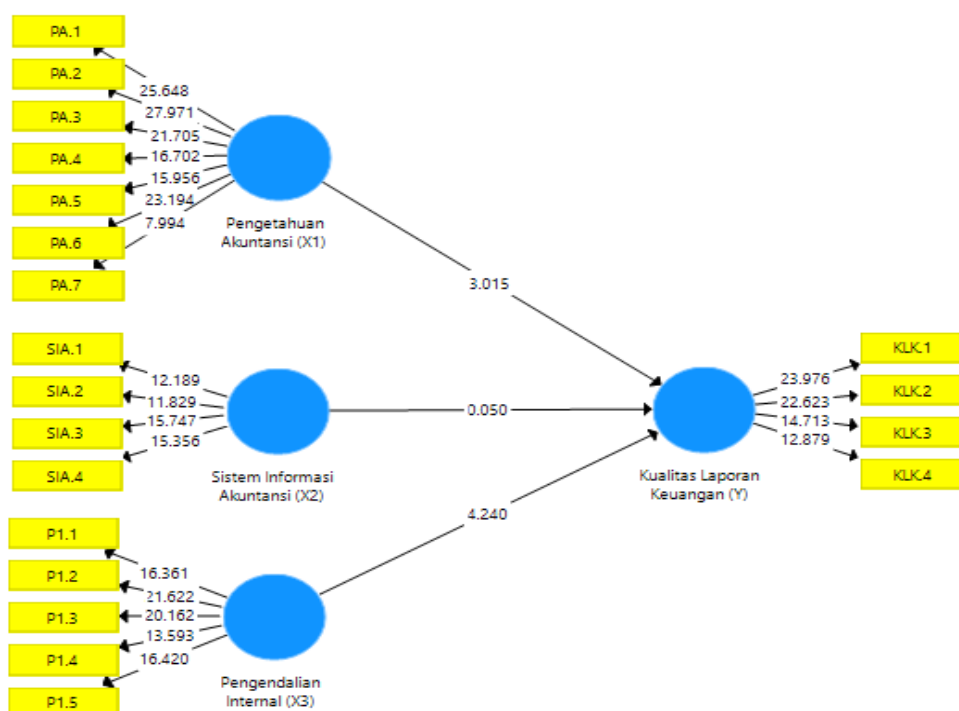
Tabel 4. Validitas Diskriminan (*Heterotrait-Monotrait Ratio / HTMT*)

Variabel	KLK	PI	PA	SIA
KLK				
PI	0,864			
PA	0,753	0,679		
SIA	0,798	0,874	0,880	

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan seluruh korelasi antar variabel berada di bawah ambang batas maksimal 0,90 Henseler et al. (2015). Hasil ini menegaskan tidak adanya masalah tumpang tindih (*overlapping*) konsep, sehingga setiap instrumen penelitian terbukti tangguh dan benar-benar mengukur aspek yang spesifik dan berbeda.

Gambar 2. Kekuatan Model



Tabel 5. Evaluasi Kualitas Model Struktural (*Inner Model*)

Variabel Endogen	R-square	Q-square	Prediktor Eksogen (Arah)	f-square	Kategori Efek
Kualitas Laporan Keuangan (KLK)	0,635	0,420	PA → KLK	0,116	Kecil
			SIA → KLK	0,000	Sangat Kecil
			PI → KLK	0,357	Besar

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5, model terbukti memiliki kemampuan prediksi yang baik karena mampu menjelaskan 63,5% variabilitas Kualitas Laporan Keuangan ($R\text{-square} = 0,635$; $Q\text{-square} = 0,420$). Uji ukuran efek ($f\text{-square}$) berdasarkan Cohen (1988) menunjukkan bahwa Pengendalian Internal memberikan kontribusi paling dominan (kategori besar), Pengetahuan Akuntansi memberikan efek kecil, sedangkan Sistem Informasi Akuntansi tidak memberikan efek yang bermakna.

Tabel 6. Model Fit

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,086	0,086
Chi-Square	516,285	516,285
NFI	0,710	0,710

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan nilai *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) sebesar 0,086 Henseler et al. (2014). Nilai SRMR yang berada di bawah batas maksimal 0,10 mengindikasikan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat kesesuaian (*goodness of fit*) yang memadai dan dapat diterima. Meskipun nilai *Normed Fit Index* (NFI) sebesar 0,710 tergolong moderat, perolehan SRMR tersebut telah memberikan bukti empiris yang cukup bahwa spesifikasi model struktural yang dibangun sudah relevan dan selaras dengan data observasi.

Tabel 7. Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hip.	Jalur Hubungan	Koefisien	T-Statistics	P-Values	Keputusan
Pengaruh Parsial					
H1	PA → KLK	0,326	3,015	0,003	Diterima
H2	SIA → KLK	0,008	0,050	0,960	Ditolak
H3	PI → KLK	0,546	4,240	0,000	Diterima
Pengaruh Simultan					
H4	PA, SIA, PI → KLK	0,635 (R^2)	53,365	53,365	Diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 7, pengujian hipotesis secara simultan (H4) membuktikan bahwa Pengetahuan Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, yang ditunjukkan oleh perolehan nilai F-hitung sebesar 53,365. Secara parsial, Pengetahuan Akuntansi (H1) dan Pengendalian Internal (H3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sejalan dengan *Compliance Theory* dari Tyran (2001) serta temuan Wardani & Norsain (2020) yang menegaskan bahwa kualitas pelaporan sangat bergantung pada kompetensi penyusun dan efektivitas perlindungan aset dari kesalahan administratif. Sebaliknya, hipotesis pengaruh SIA (H2) ditolak secara empiris (P-Value 0,960), yang secara kritis mengonfirmasi *research gap* dari Maulida & Tumirin (2025) serta Niswah & Andriyanto (2025) bahwa kecanggihan teknologi informasi tidak akan memberikan dampak bermakna terhadap *output* pelaporan apabila tidak ditopang oleh perbaikan kapasitas SDM dan pengawasan internal yang berkesinambungan di instansi tersebut.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H1)

Berdasarkan hasil pengujian model struktural (*inner model*), hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan terbukti dapat diterima. Data menunjukkan perolehan nilai koefisien jalur sebesar 0,326 dengan nilai *P-Value* 0,003. Temuan ini sangat sejalan dengan landasan *Compliance Theory* dari Tyran (2001), yang mengartikulasikan bahwa setiap entitas pemerintahan memiliki kewajiban normatif untuk menyusun pelaporan yang mematuhi standar perundang-undangan (SAP). Kepatuhan pelaporan ini pada praktiknya hanya dapat diwujudkan apabila aparatur penyusun laporan memiliki pemahaman akuntansi yang memadai untuk mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum transaksi secara sistematis dan presisi. Secara teoretis, hasil pengujian ini menolak kesenjangan riset dari Malindar et al. (2023) dan Nur et al. (2023) yang menyebutkan ketiadaan efek, sekaligus memperkuat pandangan Wardani & Norsain (2020) serta Wijayanti & Ariyani (2022) bahwa kualitas transparansi informasi keuangan suatu daerah sangat bergantung mutlak pada kapabilitas dan pemahaman dasar kompetensi sumber daya manusia yang merumuskannya.

Lebih lanjut, apabila ditelaah melalui parameter kekuatan model (nilai *f-square*), data menunjukkan bahwa variabel pengetahuan akuntansi memberikan dorongan prediktif pada kategori yang tergolong kecil (0,116). Fakta statistik ini secara presisi menjadi jawaban untuk menjelaskan fenomena praktis yang menjadi masalah di BPKAD Kabupaten Dompu. Signifikansi yang didapatkan membuktikan bahwa aparatur di instansi tersebut secara mendasar telah memiliki bekal pemahaman akuntansi yang memadai untuk menyusun laporan yang andal, sehingga terbukti mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014. Namun, kategori efek prediktif yang "kecil" tersebut juga mengonfirmasi secara empiris mengapa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih kerap mencatat temuan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait kurangnya kompetensi SDM di bidang akuntansi. Artinya, pengetahuan akuntansi aparatur saat ini sudah cukup untuk memenuhi syarat minimal WTP, tetapi belum sepenuhnya mumpuni untuk menyelesaikan kompleksitas pelaporan yang lebih tinggi seperti integrasi kebijakan akuntansi BLUD, sehingga temuan ini menuntut Pemkab Dompu untuk terus melakukan peningkatan kapasitas SDM yang lebih mendalam secara berkelanjutan.

Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H2)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2), penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu. Hal ini ditunjukkan secara tegas oleh nilai koefisien jalur yang sangat rendah yakni 0,008 dengan perolehan *P-Value* sebesar 0,960 jauh di atas ambang batas 0,05, serta kekuatan prediktif (*f-square*) sebesar 0,000 yang masuk dalam kategori sangat kecil atau tidak memberikan efek praktis. Temuan ini secara langsung menolak pandangan dominan dari sejumlah penelitian terdahulu dari Sijabat & Lestary (2022) dan Wahtan et al. (2025), yang berasumsi bahwa integrasi SIA secara otomatis akan memfasilitasi pemrosesan data menjadi informasi finansial yang andal. Sebaliknya, hasil statistik ini justru memvalidasi dan mengonfirmasi keberadaan *research gap* yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Maulida & Tumirin (2025), Niswah & Andriyanto (2025), serta Rizki et al. (2024). Fakta data dalam riset ini memberikan pembuktian teoretis bahwa ketersediaan infrastruktur dan kecanggihan sistem informasi per se tidak akan mampu memberikan dampak yang bermakna terhadap akurasi *output* pelaporan, apabila instrumen tersebut berdiri sendiri tanpa dukungan elemen organisasional yang komprehensif.

Tidak signifikannya peran SIA dalam mendongkrak kualitas laporan keuangan ini pada dasarnya merupakan cerminan langsung dari fenomena praktis tata kelola yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Fakta bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mencatat

temuan vital dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meskipun berstatus WTP menjadi jawaban utama mengapa SIA gagal berkontribusi optimal. Kegagalan sistem informasi ini sangat berkorelasi dengan temuan BPK mengenai ketidakselarasan kebijakan manajerial, seperti kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan Pemda, sehingga sistem yang ada berpotensi mengalami kendala dalam mengonsolidasikan data secara presisi. Lebih jauh lagi, ketiadaan efek SIA membuktikan bahwa teknologi hanyalah instrumen pasif yang *output*-nya sangat ditentukan oleh *brainware* atau penggunanya. Sebagaimana yang terpotret pada latar belakang masalah mengenai masih kurangnya kompetensi SDM di bidang akuntansi, dapat dipahami secara logis mengapa kehadiran SIA tidak berdampak; yakni karena tingginya tingkat kecanggihan sistem pelaporan keuangan daerah saat ini belum diimbangi secara proporsional oleh sinkronisasi kompetensi dan kapasitas adaptasi aparatur BPKAD dalam mengoperasikan, mengawasi, serta mengelola fitur-fitur pada sistem tersebut.

Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H3)

Berdasarkan hasil pengujian model struktural, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan terbukti dapat diterima dengan sangat meyakinkan. Hal ini dibuktikan melalui perolehan nilai koefisien jalur tertinggi yakni sebesar 0,546 dengan *P-Value* 0,000, serta ditopang oleh nilai *f-square* 0,357 yang menjadikannya sebagai prediktor dengan kekuatan efek paling dominan di dalam model. Fakta ini sangat selaras dengan landasan pijakan *Compliance Theory* dari Tyran (2001), di mana sebuah sistem pengawasan yang terstruktur merupakan instrumen wajib bagi entitas pemerintah untuk mematuhi standar perundang-undangan guna menghasilkan pelaporan yang berintegritas. Secara teoretis, temuan ini sekaligus membantah *research gap* dari Margaretha & Sari (2021) dan secara solid memperkuat pandangan Nur et al. (2023) serta Setiawati & Hariyono (2025), yang mengartikulasikan bahwa pengendalian internal memegang peranan penting sebagai pilar pengaman sumber informasi independen untuk melindungi aset dan menjamin keakuratan catatan akuntansi dari risiko kecurangan (*fraud*) maupun *human error*.

Lebih jauh lagi, besarnya peran pengendalian internal sebagai determinan paling dominan dalam penelitian ini memberikan penjelasan yang sangat rasional terhadap fenomena praktis yang terjadi di BPKAD Kabupaten Dompu. Fakta bahwa variabel ini memiliki ukuran efek paling besar menjawab secara langsung mengapa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu menjadikan kelemahan sistem pengendalian intern sebagai sorotan utama dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mereka setiap tahunnya, meskipun entitas tersebut secara predikat telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil statistik ini mengirimkan pesan kritis bahwa pengendalian internal merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya transparansi pelaporan (Rohmah et al., 2020; Andriani et al., 2025). Keberhasilan Pemkab Dompu mempertahankan opini WTP sejak tahun 2014 membuktikan bahwa sistem pengawasan internal dasar telah berjalan, namun catatan teguran yang berulang dari BPK mengindikasikan bahwa sistem tersebut masih rentan. Dengan demikian, temuan ini menuntut pihak manajemen BPKAD untuk menjadikan perbaikan sistem pengendalian internal seperti peningkatan ketatnya prosedur pengamanan transaksi dan kepatuhan kebijakan sebagai prioritas utama dalam menambal kelemahan tata kelola keuangan mereka ke depannya.

Pengaruh Simultan (X1,X2,X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) (H4)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4), pengetahuan akuntansi, sistem informasi akuntansi (SIA), dan pengendalian internal secara simultan terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Dompu, dengan kemampuan model menjelaskan variabilitas pelaporan sebesar 63,5% berdasarkan perolehan nilai *F*-hitung 53,365. Fakta ini meneguhkan relevansi *Compliance Theory* dari Tyran (2001), yang menggarisbawahi bahwa upaya entitas pemerintah dalam mematuhi kewajiban normatif perundang-

undangan (SAP) untuk menghasilkan pelaporan yang andal tidak dapat dicapai secara optimal hanya dengan mengandalkan satu elemen tunggal, melainkan menuntut orkestrasi yang holistik. Temuan ini secara solid mendukung agregasi pandangan teoritis dan empiris dari Wardani & Norsain (2020), Setiawati & Hariyono (2025), serta Andriani et al. (2025), yang mengartikulasikan bahwa transparansi dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan produk akhir dari integrasi yang erat antara kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami kaidah akuntansi, dukungan infrastruktur pemrosesan sistem informasi, serta tegaknya pengawasan internal yang mencegah kelemahan administratif maupun fraud.

Meskipun hasil parsial menunjukkan SIA belum memberikan dampak maksimal karena kendala kompetensi SDM, pengujian simultan ini memberikan jawaban kritis bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 pada dasarnya terbentuk berkat kolaborasi ketiga komponen tata kelola tersebut yang saling menopang satu sama lain. Oleh karena itu, guna mengeliminasi temuan kelemahan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), manajemen BPKAD dituntut untuk tidak melakukan penyelesaian masalah secara parsial, melainkan harus mengeksekusi strategi pembenahan integratif yang secara bersamaan dan berkesinambungan mampu menyinkronkan kecanggihan SIA, peningkatan kapasitas SDM, dan pengetatan efektivitas pengendalian internal entitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian pada BPKAD Kabupaten Dompu, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan, pengetahuan akuntansi, sistem informasi akuntansi (SIA), dan pengendalian internal berkontribusi signifikan dalam membentuk kualitas laporan keuangan. Secara parsial, pengetahuan akuntansi dan pengendalian internal terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan, di mana efektivitas pengendalian internal bertindak sebagai determinan yang paling dominan dalam mendorong keandalan pelaporan instansi.

Sebaliknya, penerapan SIA terbukti tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ketidadaan efek pada variabel ini mengonfirmasi bahwa kecanggihan teknologi tidak akan berdampak optimal apabila belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penggunaannya serta keselarasan kebijakan manajerial yang utuh di internal instansi. Temuan ini sekaligus merasionalisasi fenomena mengapa entitas peraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut masih memiliki catatan kerentanan administratif dalam temuan pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan agar mengeksplorasi variabel moderasi seperti efektivitas pelatihan atau budaya organisasi guna menjembatani kesenjangan penggunaan teknologi tersebut, serta memperluas lokus observasi pada entitas pemerintah lain untuk memverifikasi apakah anomali kerentanan tata kelola ini bersifat lokal atau merupakan permasalahan struktural yang lebih luas.

KONTRIBUSI

Peneliti mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu atas izin, fasilitas, dan kerja sama yang terbuka dari seluruh pegawainya yang telah bersedia berpartisipasi sebagai responden dalam penyelesaian penelitian ini. Penghormatan dan rasa terima kasih juga secara khusus ditujukan kepada institusi tempat bernaung para peneliti, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Dompu dan Politeknik AMA Bima, atas segala dukungan kelembagaan, fasilitas akademik, serta dorongan moral yang diberikan sehingga keseluruhan tahapan riset ini dapat terselesaikan dengan baik dan berdaya guna.

REFERENSI

- Amalia, M. M. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan, efektivitas pengambilan keputusan terhadap kinerja UMKM di Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(02), 97–107. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i02.362>
- Andriani, I., Hayat, N., & Shoalihin. (2025). Pengaruh pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 636–648. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.572>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Febriana, L., Mahmud, & Mauzu, F. (2025). Pengaruh pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia dan penerapan basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 437–448. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1652>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*.
- Hair, J. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hanafi, M. A., Samsudin, & Hermansyah. (2024). Pengaruh pemahaman akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor desa di Kecamatan Dompu. *JAME: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.69666/jame.v1i01.2>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 48–58. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.05>
- Malindar, B., Sairmaly, F. A., Nifanngeljau, J., & Laratman, P. (2023). Pengaruh pengetahuan akuntansi, sosialisasi standar akuntansi dan skala bisnis terhadap kualitas laporan keuangan EMKM. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832, 153–168. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15230>
- Masita, I., & Mansyuri, M. I. (2026). Determinasi kualitas laporan keuangan daerah: Peran teknologi informasi, pengendalian internal, dan kapasitas SDM. *BERNIAGA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 39–51. <https://jurnal.mnwtambora.com/niaga/article/view/15>
- Maulida, B. N., & Tumirin. (2025). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi (Studi kasus Eyelink Group). *Jurnal Riset Akuntansi*, 3. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2887>
- Niswah, S. M., & Andriyanto, I. (2025). Pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di BPKPAD Kabupaten Demak. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 10(April), 17–39.
- Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(1), 48–58. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.05>

- Pramitha, A., Sari, R., & Nurkholis, K. M. (2024). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(3), 628–639. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i3.1190>
- Putri, P. A. Y., & Endiana, I. D. M. (2020). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan (Studi kasus pada koperasi di Kecamatan Payangan). *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 179–189. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1433.179-189>
- Rizki, M. F. J., Wahyudi, I., & Olimsar, F. (2024). Pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(05), 1723–1737. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.36484>
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. *E-Jra*, 9(5), 43–51. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8286>
- Rumangun, J. P. E., Borolla, L., & Welerubun, T. (2021). Pengaruh kepatuhan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *JoPBA: Journal of Public and Business Accounting*, 2(December), 82–89. <https://doi.org/10.31328/jopba.v2i2.273>
- Setiawati, A., & Hariyono, A. (2025). Pengaruh sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2912>
- Sijabat, J., & Lestary, A. A. S. (2022). Studi pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan PT. Mujur Timber di Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 246–260. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i2.2117>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiqurrohman, Mudawanah, S., & Muthanudin, M. (2021). Pengaruh pemahaman akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis (Jurnal Manajemen & Akuntansi Indonesia)*, 9(2). <http://dx.doi.org/10.55171/jsab.v9i2.579>
- Tyran, J. (2001). *Why people obey the law*. Princeton University Press, 1–33.
- Ulfa, Mahmud, & Ramadhan, R. A. (2026). Amkop Management Accounting Review (AMAR) The impact of internal audit technology adoption (CAATs and data analytics) on financial report quality through reporting accountability. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 6(1), 1088–1099. <https://doi.org/10.37531/amar.v6i1.3694>
- Wahtan, A., Hayat, N., & Sumarni. (2025). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 363–381. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.530>
- Wardani, W. D., & Norsain. (2020). Pengaruh pengetahuan akuntansi dan kepribadian pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 1(2). <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i2.1264>
- Wijayanti, A., & Ariyani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan akuntansi dan kinerja karyawan terhadap kualitas laporan keuangan dimoderasi sistem informasi akuntansi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 2534–2542. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.966>